

BEBERAPA TANTANGAN YANG DIHADAPI PEMERINTAH BARU BANGLADESH

Parlaungan SIBARANI*

Melalui suatu kudeta tidak berdarah pada tanggal 24 Maret 1982 yang lalu,¹ golongan militer mengambil alih kekuasaan dari tangan Presiden Abdus Sattar yang terpilih dalam pemilihan umum bulan Nopember 1981 untuk menggantikan mendiang Ziaur Rachman yang terbunuh dalam suatu percobaan kudeta pada bulan Mei 1981. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal H.M. Ershad yang memotori kudeta itu menjadi pemimpin rezim militer Bangladesh yang baru dan penguasa hukum darurat militer.

Jenderal Ershad melancarkan kudeta karena beberapa hal,² yaitu: (a) kegagalan Sattar untuk memajukan perekonomian Bangladesh; (b) korupsi yang merajalela dalam pemerintahan Sattar yang dilukiskan Ershad telah mencapai tingkat yang tidak dapat dibiarkan; (c) pertentangan mengenai peranan angkatan bersenjata dalam pemerintahan. Ershad menghendaki peranan yang lebih besar di dalam pemerintahan maupun di dalam proses pengambilan keputusan penting yang lain (peran dwifungsi), sedangkan Sattar bersikeras menempatkan golongan militer sebagai alat keamanan semata-mata. Di samping hal-hal itu harus disebutkan pula perpecahan dan perebutan kekuasaan di tubuh Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) yang dikuatirkan akan menguntungkan Liga Awami (seteru utama golongan militer) yang dominasinya dalam percaturan politik di Bangladesh akan semakin mengurangi peranan angkatan bersenjata. Kecuali itu dikabarkan bahwa kudeta itu dilancarkan Jenderal Ershad untuk mendahului kelompok militer lain yang hendak merebut kekuasaan.³

*Staf CSIS.

¹*Antara*, 24 Maret 1982.

²Lihat *Asiaweek*, 26 Pebruari 1982 dan *The Economist*, 27 Maret 1982.

³Tajuk Rencana, *Jurnal Ekuin*, 26 Maret 1982.

Seperti pendahulu-pendahulunya, Ershad menghadapi tantangan-tantangan berikut: (a) menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi; (b) memajukan perekonomian nasional; dan (c) menciptakan kestabilan politik dalam negeri. Tantangan-tantangan ini merupakan beban yang sangat berat baginya. Apabila gagal memecahkan tantangan-tantangan itu, ia dapat jatuh dari tampuk kekuasaan khususnya karena harapan rakyat terpusat pada dirinya.¹ Sewaktu-waktu ia juga dapat digulingkan melalui suatu kudeta karena di kalangan militer terdapat kelompok yang tidak menyukainya. Di dalam tubuh Angkatan Bersenjata Bangladesh terdapat dua kelompok yang bersaing satu sama lain, yaitu kelompok pejuang kemerdekaan yang terdiri dari tentara dan gerilyawan yang mengambil bagian dalam perang kemerdekaan tahun 1971 dan kelompok perwira dan tentara Bengali yang menjadi anggota angkatan bersenjata Pakistan sebelum Bangladesh lahir. Ketika pecah perang kemerdekaan itu kelompok kedua ini ditahan di Pakistan Barat dan baru dipulangkan ke Bangladesh dua tahun kemudian. Jenderal Ershad termasuk di dalam kelompok ini,² sehingga ketika ia diangkat oleh Presiden Ziaur Rachman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat untuk menggantikan Jenderal Manzur Ahmad yang dipecatnya timbul keresahan di kalangan angkatan darat yang berjuang dalam perang kemerdekaan. Persaingan antara kedua kelompok itu berlangsung terus dan memecah-belah Angkatan Bersenjata Bangladesh.³

Tulisan ini mengupas tantangan-tantangan yang dihadapi Ershad dan langkah-langkah yang diambilnya untuk mengatasinya. Dari situ akan ditarik kesimpulan mengenai masa depan Bangladesh di bawah pemerintahan Ershad.

MEMBERANTAS KORUPSI, MENATA BIROKRASI DAN PENGHEMATAN

Jenderal Ershad rupanya tidak ingin mengulangi kesalahan Presiden Sattar yang membiarkan korupsi merajalela di dalam tubuh pemerintahnya. Janjinya kepada rakyat Bangladesh bahwa kudeta yang dilancarkannya bertujuan untuk menyelamatkan negara dari pemerintahan sipil yang korup serta dari bencana-bencana lain tampaknya akan dipenuhinya dengan tulus dan sungguh-sungguh.⁴ Hal itu tercermin dari serangkaian kebijaksanaan pokok yang

¹Dikatakan demikian dengan asumsi bahwa kudeta sudah menjadi tradisi di dalam kehidupan politik Bangladesh. Semenjak kemerdekaannya pada tahun 1971 Bangladesh mengalami 16 kali kudeta, *Merdeka*, 8 April 1982.

²*The Economist*, 27 Maret 1982.

³Perpecahan itu antara lain terlihat dari usaha kudeta Jenderal Manzur Ahmad yang mengakibatkan terbunuhnya Presiden Ziaur Rachman.

⁴Lihat "The Master of Bangladesh," *The Guardian Weekly*, 4 April 1982.

diumukannya dalam masa-masa permulaan pemerintahannya, yaitu memerangi korupsi, merapikan pemerintahan dan menghemat pengeluaran negara. Dalam rangka menumpas korupsi tersebut Ershad menegaskan bahwa pemerintahannya akan menindak keras mereka yang korup dan menyelewengkan kekuasaan negara¹ dan membentuk 23 badan pengadilan kilat militer yang diperintahkan mengambil tindakan tegas terhadap para koruptor sesuai dengan hukum darurat perang. Berdasarkan hukum itu mereka (serta orang-orang yang melakukan kejahatan politik dan memiliki senjata gelap) dapat dijatuhi hukuman mati, pengasingan seumur hidup atau kerja paksa selama 14 tahun. Sejauh ini penguasa telah menangkap sekitar 300 orang yang dituduh melakukan korupsi, menyelewengkan kekuasaan dan melakukan kegiatan anti negara. Di antaranya adalah bekas wakil perdana menteri dan enam orang menteri. Semuanya akan diajukan ke pengadilan.² Ershad juga telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah meluasnya korupsi di kalangan aparat pemerintah dengan mengancam akan memecat pegawai-pegawai negeri yang menyalahgunakan kekuasaannya demi kepentingan pribadi.³

Selaras dengan janjinya untuk merapikan aparat pemerintah, Ershad bersama-sama dewan penasihatnya yang beranggotakan 12 orang telah mengurangi jumlah kementerian dan divisi dari 40 kementerian menjadi 17 dan 52 divisi menjadi 42. Penyederhanaan ini sekurang-kurangnya menimbulkan kesan yang positif bahwa Ershad juga bersungguh-sungguh untuk meningkatkan efisiensi dan daya guna aparat pemerintahannya. Lebih lanjut ia mengambil langkah-langkah penghematan pengeluaran negara khususnya di sektor Kementerian Luar Negeri. Dalam rangka reorganisasi kementerian itu pemerintah menarik 22 orang diplomat senior (15 duta besar dan 7 pejabat tinggi), menurunkan beberapa perwakilan luar negeri ke tingkat kuasa usaha, menutup 9 misi dagang yang akan direorganisasi dan digabungkan dengan bagian-bagian ekonomi perwakilan-perwakilan Bangladesh yang terdekat. Dari kebijaksanaan ini Pemerintah Bangladesh mengharapkan dapat menghemat sekitar US\$ 2,5 juta setiap tahun.⁴

Beberapa kebijaksanaan yang ditempuh Ershad itu merupakan gambaran awal mengenai kesungguhannya untuk memperbaiki keadaan di Bangladesh

¹Lebih jauh ia mengatakan bahwa pemerintahannya akan melakukan perang jihad terhadap korupsi sampai orang bersalah terakhir dihukum. Lihat *Antara*, 19 April 1982.

²Pejabat-pejabat yang ditangkap adalah Wakil PM S.A. Bari, Menteri Goni Habibul Khan, Menteri Keuangan Saifur Rahman, Menteri Tenaga Kerja Abdul Hasnat; Menteri Negara Bidang Perdagangan Dalam Negeri Tanvir Ahmed Siddiky dan Menteri Negara Tenaga Kerja Ataudin, Khan. Empat Menteri lainnya, yaitu Jamaluddin Ahmed, Obaidur Rahman, Nurul Huq dan Mayor Jenderal Huq yang bersembunyi diminta untuk menyerahkan diri secepatnya. Lihat S. Kamaluddin, "Bangladesh Marching Orders," *FEER*, 2 April 1982, hal. 22.

³*Antara*, 8 April 1982.

⁴*Antara*, 15 April 1982.

dan diharapkan dapat menghapus kesan buruk rakyat terhadap pemerintah yang tumbuh semasa pemerintahan Sattar. Di lain pihak langkah-langkah itu dapat menjadi credit point bagi dirinya di mata rakyat untuk dapat terus memerintah.

PERBAIKAN EKONOMI

Namun Ershad membutuhkan waktu untuk dapat memperbaiki keadaan di Bangladesh. Tiadanya perbaikan-perbaikan di bidang ekonomi dan kehidupan rakyat akan berarti bahwa segala usaha yang dijalankannya sia-sia. Kegagalannya memperbaiki perekonomian Bangladesh akan menjadi alasan kuat bagi lawan-lawan politiknya, baik yang terdapat di kalangan militer maupun di kalangan politisi sipil untuk menggulingkannya dari tampuk kekuasaan. Hal ini sesuai dengan pendapat para pengamat bahwa masalah ekonomi merupakan masalah utama yang dihadapi Ershad. Mereka mengatakan bahwa kampanye menentang korupsi itu hanya bisa menentramkan masyarakat untuk sementara, sedangkan kebutuhan akan pekerjaan, pangan dan tempat tinggal akan terus meningkat. Bencana akan terjadi bilamana Pemerintah Ershad gagal memperbaiki kehidupan rakyat Bangladesh. Rakyat boleh jadi akan mencari pemecahan lain seperti terungkap dalam ucapan seorang penarik becak di Dacca: "Kita telah melalap lusinan jenderal, mari kita lihat berapa lama Ershad dapat bertahan."¹

Bahwa masalah ekonomi ini begitu menentukan bagi rakyat Bangladesh selanjutnya tercermin dari pendapat berikut ini: "Bahwa masalah yang sesungguhnya di Bangladesh bukan mengenai corak pemerintahannya tetapi pembangunan ekonomi."² Kesan yang sama terungkap dalam adagium "Bahwa politik di Bangladesh hanya terdiri dari dua hal, beras dan agama." Pemimpin yang memperhatikan kedua hal ini akan keluar sebagai pemimpin yang berhasil. Soal demokrasi, pemilihan umum dan kekuasaan di tangan rakyat adalah soal kedua.³

Ershad mempunyai cukup alasan untuk menempatkan masalah ekonomi sebagai tantangan utama karena situasi dan kondisi perekonomian Bangladesh sangat memprihatinkan, baik dilihat dari kenyataan geografis dan jumlah penduduk maupun tingkat pertumbuhan ekonominya. Bangladesh ter-

¹Kuldip Nayar, "Economic Challenges for the Bangladesh Military," *South*, Juni 1982, hal. 21.

²*Ibid.*, hal. 22.

³Threes Nio: "Kudeta di Bangladesh," *Kompas*, 27 Maret 1982.

golong sebagai negara paling miskin di dunia setelah Bhutan¹ yang sangat miskin akan sumber daya alam dan tergolong negara yang paling padat penduduknya di dunia. Delapan puluh persen penduduknya yang berjumlah lebih dari 90 juta hidup dari pertanian. Bidang ini menyumbang sekitar 50% pada GDP Bangladesh sedangkan bidang industri kurang dari 10%. Maju mundurnya perekonomian Bangladesh sangat berpengaruh pada pendapatan per kapita rakyat. Menurut perkiraan Bank Dunia pendapatan per kapita Bangladesh tahun 1975 adalah US\$ 90, tahun 1976 US\$ 110, tetapi menurun menjadi US\$ 80 pada tahun 1977 dan US\$ 90 pada tahun 1978.² Menurut perhitungan terakhir pendapatan per kapita Bangladesh hanya mencapai US\$ 100 per tahun.

Buruknya iklim di Bangladesh merupakan tantangan yang terus-menerus dihadapi pemerintah dan hingga kini belum ditemukan cara yang manjur untuk mengatasinya. Masalah iklim ini menjadi salah satu faktor yang sangat menyulitkan usaha-usaha pemerintah untuk memajukan sektor pertanian. Tanah di Bangladesh tergolong sangat subur tetapi tanam-tanaman sering rusak akibat banjir, topan dan kekeringan. Peningkatan produksi pangan sangat dihambat oleh kenyataan bahwa bila hujan turun tepat pada waktunya tanaman akan tergenang air, tetapi bila terlambat datang tanaman akan dilanda kekeringan. Oleh karena itu Bangladesh terus-menerus menghadapi kekurangan pangan yang bila tidak ditanggulangi dengan serius dapat menimbulkan kelaparan. Betapa seriusnya masalah pangan ini antara lain dapat dilihat dari situasi pangan yang dihadapi Bangladesh pada bulan Maret 1982 yang lalu. Atas desakan Program Pangan Dunia, India terpaksa mengalihkan 103.000 ton gandum kiriman Amerika Serikat yang sedianya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sebab kekurangan pangan di Bangladesh sudah sedemikian parahnyanya.³ Produksi beras dan gandum Bangladesh tidak mencukupi kebutuhan pangan sehingga Bangladesh setiap tahunnya mengimpor sekitar dua juta ton padi-padian seharga sekitar 25% dari anggaran tahunannya.⁴ Dengan tingkat pertumbuhan penduduk lebih dari 35% setahun permasalahan yang dihadapi Bangladesh semakin bertambah kompleks dan untuk mengatasinya pemerintah harus menekan laju pertumbuhan itu dan sekaligus mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari tingkat rata-rata pertumbuhan penduduk.

¹"Bangladesh, Kudeta Menjelang Subuh," *Tempo*, 3 April 1982, hal. 17. Oleh PBB Bangladesh digolongkan sebagai negara miskin yang tidak mempunyai sumber-sumber daya alam potensial (LDC - Less Developed Countries).

²"Bangladesh, Introductory Survey," *European Year Book*, Vol. I, 1982, hal. 1602.

³Bank Dunia memperkirakan bahwa untuk bulan Maret 1982 Bangladesh membutuhkan bantuan pangan sebanyak 500.000 ton, *Tempo*, *loc. cit.*

⁴*Kompas*, 31 Maret 1982.

Dengan situasi dan kondisi perekonomian seperti ini Bangladesh karenanya dijuluki sebagai negara "kantong bolong" atau "negara keranjang sampah."¹ Dengan demikian Ershad mewarisi dua hal. Pertama, kebobrokan dalam pemerintahan pendahulu-pendahulunya. Kedua, situasi perekonomian yang memprihatinkan² serta kondisi geografis yang kurang potensial untuk membangun suatu perekonomian yang kuat dan stabil.

Oleh karena itu seperti penguasa-penguasa sebelumnya Ershad menghadapi tantangan-tantangan yang sangat berat di bidang-bidang itu. Karenanya ia harus mengerahkan segala upayanya untuk mencari pemecahan-pemecahan. Pertama-tama ia harus dapat mengatasi kelangkaan pangan, baik dengan jalan meningkatkan produksi pangan dalam negeri maupun mengimpor atau mendapatkan pangan dari bantuan internasional. Untuk meningkatkan produksi pangan tersebut Ershad harus dapat menemukan suatu sistem pertanian yang manjur yang dapat memajukan pertanian Bangladesh, terlebih-lebih karena pangan merupakan salah satu persoalan sentral yang paling mendesak, rawan serta mempunyai pengaruh yang sangat kuat atas kestabilan ekonomi dan politik Bangladesh.³ Ershad juga harus memikirkan cara-cara pelunasan hutang luar negeri Bangladesh yang telah mencapai sekitar US\$ 1 milyar⁴ dan sekaligus berusaha sebaik-baiknya untuk menghilangkan keragu-raguan negara donor dan badan-badan internasional untuk memberikan pinjaman kepada Bangladesh sebab tanpa suntikan pinjaman luar negeri kelancaran dan kesinambungan pembangunan Bangladesh akan terhambat.⁵ Terlebih-lebih karena ada ramalan bahwa Bangladesh akan menghadapi kesulitan mendapat pinjaman luar negeri pada tahun 1982 dan 1983.

Sebagai langkah pertama di bidang pangan Ershad telah menjalankan kebijaksanaan menekan harga beras di pasaran. Harga memang menurun dari 9

¹Istilah ini sering digunakan untuk melukiskan tingkat kemiskinan suatu negara khususnya yang tergolong LDC.

²Kematian Ziaur Rachman membawa pengaruh yang cukup memukul pertumbuhan ekonomi Bangladesh dan bahkan menimbulkan krisis ekonomi. Cadangan devisa negara hanya US\$ 135 juta pada Oktober 1981, harga-harga meningkat dan pertumbuhan industri sangat lamban. Kecuali itu prospek kebutuhan dasar semakin tidak menentu, bantuan luar negeri seret dan pendapatan luar negeri menurun drastis. Di bidang pangan persediaan sangat terbatas.

³Untuk meningkatkan produksi pangan, Ziaur Rachman melancarkan program "revolusi damai," antara lain dengan memperdalam 103 kanal sepanjang 500 mil untuk mengatasi musim kering sehingga persediaan air terjamin sepanjang tahun. Program itu cukup berhasil dan mendapat sambutan yang luas dari rakyat. Lihat *Sinar Harapan*, 26 Maret 1982.

⁴*Merdeka*, 8 April 1982.

⁵Bank Dunia memperkirakan bahwa Bangladesh membutuhkan bantuan luar negeri sebesar US\$ 2 milyar setahun untuk meningkatkan kehidupan ekonomi Bangladesh. Lihat *Tempo, loc. cit.* Untuk lebih mengetahui situasi keuangan Bangladesh lihat S. Kamaluddin, "An Unsatisfactory Economic Situation," *FEER*, 26 Maret 1982.

taka (1 taka sekitar 45 sen dollar) menjadi 6-7 taka per seer (kurang dari sekilo), namun menurut para analis penurunan itu tidak bersifat ekonomis tetapi akibat rasa ketakutan. Mereka berpendapat bahwa sebelum mengatur harga Ershad seharusnya meningkatkan pengadaan gandum terlebih dahulu agar dapat menanggulangi masalah pangan secara lebih efektif karena produksi gandum Bangladesh sangat strategis bagi pemenuhan pangan di dalam negeri. Lagi pula kebijaksanaan di bidang harga tidak memecahkan persoalannya secara mendasar sebab manfaatnya hanya bersifat sementara (jangka pendek).

Guna mengatasi hambatan-hambatan untuk mendapatkan bantuan luar negeri, Ershad mengangkat Direktur Bank Dunia A.M.A. Muith menjadi Menteri Keuangan. Pengalamannya yang luas diharapkan dapat membantunya mengatasi kesulitan-kesulitan finansial yang dihadapi Bangladesh. Dalam rangka mencari dana untuk membiayai pembangunan dalam negeri tersebut Ershad melawat ke Arab Saudi pada tanggal 2-4 Mei 1982. Sebagai negara donor Bangladesh yang terbesar di antara negara-negara Timur Tengah, Arab Saudi menjanjikan dukungan ekonomi sepenuhnya kepada Bangladesh. Hal ini merupakan sukses besar yang dicapai Jenderal Ershad dalam masa-masa permulaan kekuasaannya.

Pada tanggal 3 Juni 1982 Pemerintah Ershad mengumumkan suatu Kebijakan Industri Baru (New Industrial Policy), yaitu suatu kebijaksanaan untuk mengalihkan sebagian besar industri pemerintah ke tangan swasta. Seperti tercantum dalam kebijaksanaan 15 pasal itu gagasan pokoknya ialah mengembangkan sektor industri dengan memperluas partisipasi swasta, mengembangkan teknologi domestik serta mendorong para pengusaha untuk menerapkan teknologi tepat guna. Shafiul Azam, penasihat di bidang industri, mengatakan bahwa kebijaksanaan itu merupakan perwujudan kebutuhan negara, bukan refleksi pertimbangan doktriner. Namun menurut para pengamat diplomatik di Dacca kebijaksanaan baru itu sangat membebani sektor swasta dan sulit dilaksanakan. Sektor swasta di Bangladesh menghadapi banyak masalah baik di bidang manajemen maupun finansial. Karenanya sangat diragukan kemampuannya untuk membiayai semua unit industri yang ditawarkan pemerintah kepadanya.¹

Sejauh mana Ershad akan berhasil memperbaiki perekonomian Bangladesh karenanya masih merupakan tanda tanya, meskipun beberapa pengamat mengatakan bahwa Ershad sejauh ini dapat mengatasi masalah-masalah ekonomi yang pokok.

¹Lihat S. Kamaluddin, "Dacca's Summer Sale," *FEER*, 18 Juni 1982, hal. 90.

PEMBANGUNAN DI BIDANG POLITIK

Bidang ekonomi dan politik adalah ibarat dua sisi sekeping mata uang yang saling mempengaruhi. Kestabilan di bidang ekonomi karenanya sangat tergantung pada kestabilan di bidang politik dan sebaliknya. Keberhasilan suatu pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa membangun suatu sistem politik yang mapan (established) tidak akan menjamin kelangsungan kekuasaannya.¹ Oleh karena itu tantangan kedua yang paling penting bagi Ershad ialah membangun suatu sistem politik yang dapat menjamin stabilitas politik di Bangladesh.

Dari pengalaman yang sudah-sudah tampak dengan jelas bahwa suatu sistem politik yang didominasi oleh golongan sipil tidak dapat menjamin kestabilan politik di negara itu. Seperti di negara-negara berkembang lainnya peran-serta (partisipasi) golongan militer di dalam struktur kekuasaan pemerintah merupakan suatu keharusan mutlak,² terlebih-lebih karena angkatan bersenjata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah berdirinya negara Bangladesh dan dalam proses itu berkembang sebagai kekuatan sosial politik yang tangguh di samping kekuatan-kekuatan sosial politik lainnya. Karenanya golongan militer tidak mungkin ditempatkan sebagai penonton atau hanya diberi peran sebagai alat keamanan semata-mata.

Ambisi golongan militer untuk memainkan peranan penting dalam pemerintahan harus selalu diperhitungkan sebab kalau tidak mereka akan terdorong untuk mengambil alih kekuasaan. Justru karena hal itulah Bangladesh terus-menerus dilanda pergolakan seperti kita saksikan selama ini, tetapi hal itu tidak disadari sepenuhnya oleh para politisi sipil, padahal ambisi semacam itu sudah muncul pada masa pemerintahan Presiden pertama Bangladesh Sheikh Mujibur Rachman, baik karena kegagalannya membangun negara itu maupun karena kecenderungannya untuk memencilkan angkatan bersenjata dari arena kekuasaan. Tindakan yang diambil oleh Bapak Bangladesh ini untuk mengurangi kekuatan golongan militer mengundang ketidakpuasan mereka terhadapnya, terlebih-lebih setelah ia membentuk "Rakhi Bahini" (semacam angkatan bersenjata bayangan) yang digunakannya untuk menghadapi golongan militer.³ Mujibur Rachman akhirnya digulingkan dan di-

¹Pengalaman Pakistan pada masa pemerintahan Ayub Khan dapat dijadikan misal. Keberhasilannya memajukan perekonomian Pakistan ternyata tidak menjamin kelangsungan kekuasaannya sebab ia gagal membangun suatu sistem politik yang dapat menunjang kestabilan politik Pakistan. Lihat Alfian, *Militer dan Politik: Pengalaman Beberapa Negara* (Jakarta: Leknas, 1969), hal. 15-24.

²Dalam terminologi politik peran-serta itu disebut "fungsi stabilisator politik."

³Kekuatan Rakhi Bahini mencapai 25.000 orang yang dipersenjatai dan setia kepada Mujibur Rachman.

bunuh,¹ demikian pula penggantinya Khondakar Mostaque (juga seorang sipil). Sejak itu golongan militer memegang kendali pemerintahan serta menguasai arena politik.

Oleh karena itu langkah-langkah yang diambil Presiden Sattar sangat bertentangan dengan kenyataan politik di Bangladesh. Usahnya untuk membatasi peranan militer justru menjadi salah satu sebab mengapa ia digulingkan dari tampuk kekuasaan. Sattar bersikeras untuk membentuk suatu pemerintahan sipil yang demokratis dan mengabaikan tuntutan golongan militer akan peranan penting dalam pemerintahan, sehingga mereka terdorong untuk merebut kekuasaan dari tangannya.²

Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa sistem politik yang akan dibangun Ershad adalah sistem yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi golongan militer. Mengingat pengalaman-pengalaman di masa lampau, masalah peran golongan militer ini harus mendapat prioritas untuk diselesaikan di samping masalah-masalah utama lainnya. Di dalam sistem politik ini peran-serta mereka dalam pengambilan keputusan-keputusan politik akan terjamin dan mereka dibenarkan untuk memainkan peranan penting di dalam pemerintahan.³ Tetapi Ershad akan membuat kekeliruan fatal bila ia berusaha untuk memusatkan kekuasaan mutlak di tangan militer atau menciptakan suatu rezim diktaktor militer sebab hal itu akan mematikan aspirasi demokrasi di Bangladesh. Peranan militer yang lebih dominan dalam sistem politik baru ini lebih mudah diterima daripada mematikan aspirasi demokrasi.

Dari langkah-langkah yang diambilnya dan janji-janji yang diucapkannya tampaknya Ershad tidak mempunyai maksud semacam itu, tetapi cenderung untuk memantapkan peran dominan golongan militer dalam pemerintahan.⁴ Langkah-langkah yang diambil Ershad di bidang politik sejauh ini adalah

¹Menurut Ershad yang menjelaskan rangkaian politik di Bangladesh, kudeta itu dilakukan karena angkatan bersenjata tidak mendapat peranan penting lagi di dalam kekuasaan. Lihat *Kompas*, 26 Pebruari 1981.

²Sattar terpilih sebagai Presiden Bangladesh karena mendapat dukungan penuh dari golongan militer untuk menghadapi saingan utamanya Dr. Kamal Hossain dari Liga Awami yang dikuatirkan akan mengalahkan Sattar. Namun karena idealismenya untuk mendirikan suatu pemerintahan sipil yang demokratis dan konstitusional, golongan militer menarik dukungannya dan melancarkan kudeta pada tanggal 24 Maret 1982.

³Tersiar kabar bahwa Bangladesh akan meniru model Indonesia yang menjamin peran-serta militer dalam kekuasaan negara. Lihat Patrick Frances, "Will the Bangladesh Army Return to Barracks?," *The Guardian Weekly*, April 1982, hal. 4. Dengan demikian pendapat-pendapat yang menyerukan agar militer kembali ke tangsi tidak akan terwujud.

⁴Antara lain tampak dari formasi Dewan Penasihat (identik dengan Kabinet). Mayoritas diangkat dari kalangan militer.

memberlakukan hukum darurat militer (*martial law*), membubarkan parlemen, membekukan konstitusi, melarang semua kegiatan dan agitasi politik serta membubarkan segala organisasi mahasiswa di setiap lembaga pendidikan. Ia juga mengangkat seorang Presiden sipil Mohammad Chowdhury yang santer dikabarkan berfungsi sebagai presiden simbol. Dilihat dengan kacamata politik langkah-langkah itu seakan-akan merupakan bagian dari usaha Ershad untuk mewujudkan suatu rezim diktator militer. Tetapi ia perlu melakukannya untuk mewujudkan sistem politik yang lebih baik di Bangladesh. Langkah-langkah itu lazim dalam suatu peralihan kekuasaan yang mendadak dan dapat dipahami baik sebagai salah satu cara untuk mengisi kekosongan politik maupun untuk membersihkan aparatur negara dan pemerintah. Konstitusi baru yang akan disusun untuk menggantikan konstitusi lama yang dibekukan itu rupanya dimaksud sebagai landasan konstitusional bagi legitimasi sistem politik yang baru itu. Seperti dinyatakan oleh Ershad, langkah-langkah itu semata-mata bertujuan untuk menciptakan suatu iklim politik yang sehat demi pertumbuhan demokrasi di Bangladesh.

Ia menyatakan keinginannya untuk memulihkan demokrasi secepatnya, tetapi demokrasi yang akan diterapkan di negara itu harus dapat memenuhi harapan dan aspirasi rakyat. Bahwa Ershad tidak bermaksud untuk membentuk suatu pemerintah diktator militer selanjutnya terlihat dari janjinya kepada rakyat Bangladesh bahwa bila selama dua tahun mendatang keadaan di Bangladesh dapat dipulihkannya ia akan menyelenggarakan suatu referendum atau pemilihan umum untuk mengembalikan demokrasi di negara itu. Ia menegaskan bahwa begitu ia merasa telah mencapai tujuan-tujuannya ia akan menyelenggarakan pemilihan yang jujur dan menyerahkan kendali kekuasaan kepada para politisi pilihan rakyat.¹

Akan tetapi apakah Ershad akan berhasil membangun suatu sistem politik yang lebih baik masih sulit diperkirakan. Demikian pula masih merupakan tanda tanya apakah ia akan menepati janji-janjinya sebab janji sering tidak ditepati karena bermacam-macam alasan. Langkah-langkah permulaan yang diambilnya di bidang politik seperti dikemukakan di atas dalam kenyataan mengganggu proses pembangunan demokrasi di Bangladesh. Bila berlarut-larut, hal itu dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan politisi dan gejolak-gejolak politik baru di Bangladesh. Ershad harus memperhitungkannya dan bertindak lebih bijaksana.

Agar berhasil membangun suatu sistem politik yang lebih baik di Bangladesh, tiga hal pokok kiranya harus dilaksanakan oleh Ershad. Pertama, ia harus menyusun suatu sistem kepartaian yang dapat menunjang sistem politik

¹FEER, 2 April 1982.

baru yang lebih baik. Sebab salah satu faktor ketidakstabilan politik di Bangladesh adalah situasi kepartaian yang sangat buruk karena banyaknya partai politik, yaitu 74 partai politik, dan 60 di antaranya tidak memiliki komite sentral atau kantor partai dan sekitar 30 merupakan partai "aktentas" (yang hanya memiliki kop surat dan stempel). Kegiatan mereka kebanyakan terbatas pada pembuatan pernyataan pers mengenai masalah-masalah nasional dan internasional,¹ sehingga kurang membangun kemantapan politik di dalam negeri. Yang menonjol hanyalah fragmentasi dan kompetisi yang berlangsung dengan sengit antara mereka. Dengan perkataan lain sistem kepartaian seperti itu tidak mungkin dapat membina kestabilan politik dan ini tercermin dari banyaknya partai yang lahir dan mati² serta kegagalan para politisi sipil untuk membina demokrasi di Bangladesh. Kedua, sistem politik yang akan dibangun kecuali untuk legitimasi peran-serta golongan militer di dalam struktur kekuasaan, hendaknya bukan dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan diktaktor militer. Ketiga, ia harus dapat memperoleh dukungan sepenuhnya dari angkatan bersenjata. Dalam hal ini Ershad harus mampu menjadi pemerisatu di kalangan militer yang juga menghadapi krisis persaingan dan perpecahan. Kegagalannya mempersatukan angkatan bersenjata akan dapat ikut menggagalkan usaha-usahanya baik untuk memajukan perekonomian Bangladesh maupun untuk menciptakan sistem politik yang lebih baik di negara itu.

PENUTUP

Kondisi dan suasana politik yang semakin buruk di Bangladesh telah mendorong golongan militer untuk merebut kekuasaan dari tangan Presiden sipil Abdus Sattar pada tanggal 24 Maret 1982 yang lalu. Jenderal Ershad motor kudeta itu menjadi pemimpin rezim militer baru di negara itu. Seperti pendahulu-pendahulunya ia menghadapi banyak tantangan di bidang birokrasi, ekonomi dan politik. Ershad telah mengambil beberapa langkah penting untuk memperbaiki keadaan, antara lain memberantas korupsi, menata kembali aparatur pemerintah, menjalankan kebijaksanaan-kebijaksanaan efisiensi dan penghematan. Ia juga telah menjalankan serangkaian kebijaksanaan di bidang ekonomi untuk memperbaiki perekonomian Bangladesh yang mengalami krisis. Di bidang politik Ershad berusaha untuk membangun suatu sistem politik baru yang lebih baik yang dapat menjamin peran-serta golongan militer dalam struktur kekuasaan pemerintah.

¹*Sinar Harapan*, 12 Maret 1982.

²*Ibid.*

Dari rangkaian kebijaksanaan yang dilakukannya sejauh ini tampaknya Ershad bersungguh-sungguh untuk memperbaiki keadaan di Bangladesh. Bila usaha-usaha Ershad itu didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, masa depan Bangladesh akan lebih baik daripada keadaannya pada masa pemerintahan Sattar. Namun jalan ke arah ini masih panjang. Ershad masih harus membuktikan keberhasilan usaha-usaha yang dirintisnya untuk memecahkan tantangan-tantangan yang kini dihadapinya. Lagi pula kesemuanya itu merupakan ujian bagi itikad baiknya untuk membangun kehidupan yang lebih baik di Bangladesh dan bukan sekedar ambisi untuk berkuasa.